

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Denpasar Utara Atas Data Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKjIP ini menyajikan capaian riil atas target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026. Fokus utama laporan ini mencakup analisis keberhasilan, hambatan, serta efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis, mulai dari kualitas pelayanan publik (Indeks Kepuasan Masyarakat), koordinasi kewilayahan, hingga pembinaan pemerintahan desa.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur di Kecamatan Denpasar Utara serta dukungan penuh dari Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, kami juga menyadari masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk menentukan arah kebijakan serta perbaikan kinerja yang lebih optimal di masa mendatang demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabel di wilayah Denpasar Utara.

Denpasar, 6 Pebruari 2026

Camat Denpasar Utara



PARAF HIERARKI	
Sekcam.	<i>[Signature]</i>
Kasubag.	<i>[Signature]</i>
Pelaksana.	<i>[Signature]</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	7
1.4. Landasan Hukum.....	9
1.5. Sistematika.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	13
2.2. Rencana Kerja (Renja)	14
2.3. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Denpasar Utara	45
3.2. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP.....	69
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025 dan IKU 2025.....	70

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	4
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan	5
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Jangka Menengah	14
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025	17
Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	46
Tabel 3.2. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025	48
Tabel 3.3. Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	49
Tabel 3.4. <i>Benchmark</i> Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Denpasar Utara dengan Kecamatan Lainnya di Kota Denpasar	51
Tabel 3.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	52
Tabel 3.6. Target Realisasi dan Capaian berdasarkan Indikator Kinerja Anggaran Tahun 2025	63
Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	64
Tabel 3.8. Anggaran, Realisasi dan Capaian per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	67

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan diselaraskan dengan target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026.

Dalam upaya menjawab isu strategis “**Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara**”, Kecamatan Denpasar Utara menetapkan tujuan utama yaitu “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**”. Sepanjang tahun 2025, efektivitas pencapaian tujuan tersebut diukur melalui tiga sasaran strategis dengan hasil sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan** : Diukur melalui indikator **Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**, menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai **93,34** dari target 93,16 (100,19%). Hal ini merefleksikan peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas inovasi layanan digital yang diterapkan.
2. **Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah** : Diukur melalui **Persentase Koordinasi yang Terlaksana**, mencapai realisasi fisik sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **93.98%** dari target 100% adalah indikator positif yang disebut dengan Efisiensi Anggaran, hal ini menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dicapai sepenuhnya dengan biaya yang lebih hemat.
3. **Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** : Diukur melalui **Jumlah Desa yang Dibina**, mencapai realisasi **100%** dengan membina **8 desa** di wilayah Denpasar Utara guna memastikan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Dari sisi keuangan, Kecamatan Denpasar Utara berhasil merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 25.292.448.596,-** atau 93.98% dari pagu anggaran Rp. 26.911.520.328,-. Penyerapan ini diikuti dengan tingkat capaian kinerja fisik yang tinggi, sehingga menunjukkan prinsip *value for money* (konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama : **Ekonomi**, **Efisiensi**, dan **Efektivitas**) yang baik.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2025 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Namun demikian, upaya keberlanjutan tetap dilakukan melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur dan pengembangan inovasi pelayanan publik guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari sumber daya aparatur pemerintahan yang didukung oleh sumber daya lainnya. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kecamatan Denpasar Utara untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
4. Pengukuran kinerja juga dijadikan dasar dalam pemberian **reward** dan **punishmen**, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Kecamatan Denpasar Utara berada antara 08 35' 31" – 08 44" 49" Lintang Selatan dan berada antara 115 12' 09" – 115 04' 39" Bujur Timur. Luas wilayah 2.669 Ha yang terdiri dari jalan, pemukiman, perkantoran dan sungai. Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara per Desember 2025 sebanyak 164.158 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 85.012 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 82.694 jiwa. Wilayah Administratif Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 8 Desa, 3 Kelurahan dengan 102 dusun/banjar.

1.2.1. Struktur Organisasi

Kecamatan Denpasar Utara dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Camat dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023. Secara rinci Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

I. Struktur Kecamatan

1. Camat :

Pimpinan tertinggi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat :

Dipimpin oleh **Sekretaris Kecamatan (Sekcam)** yang membawahi :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** : mengelola urusan administrasi umum, perlengkapan, dan manajemen SDM.

b. **Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan** : mengelola perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja (LKjIP).

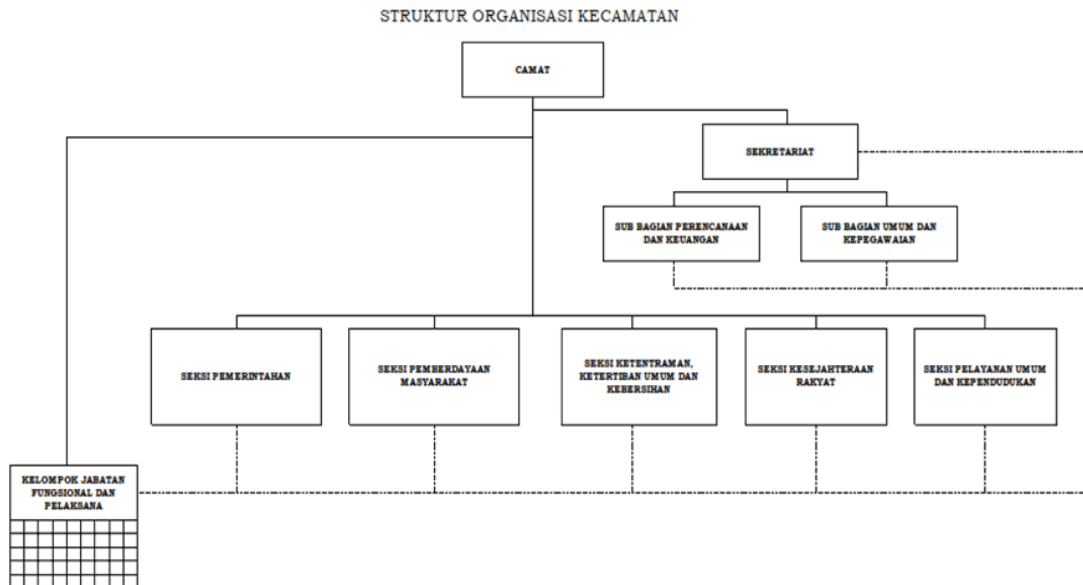
3. Seksi-Seksi (Unsur Pelaksana) :

a. **Seksi Pemerintahan** : mengurus administrasi kependudukan dan pertanahan,

b. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** : koordinasi pembangunan desa/kelurahan dan pemberdayaan ekonomi,

c. **Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kebersihan** : koordinasi keamanan wilayah dan pengelolaan kebersihan lingkungan,

d. **Seksi Pelayanan Publik** : penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).



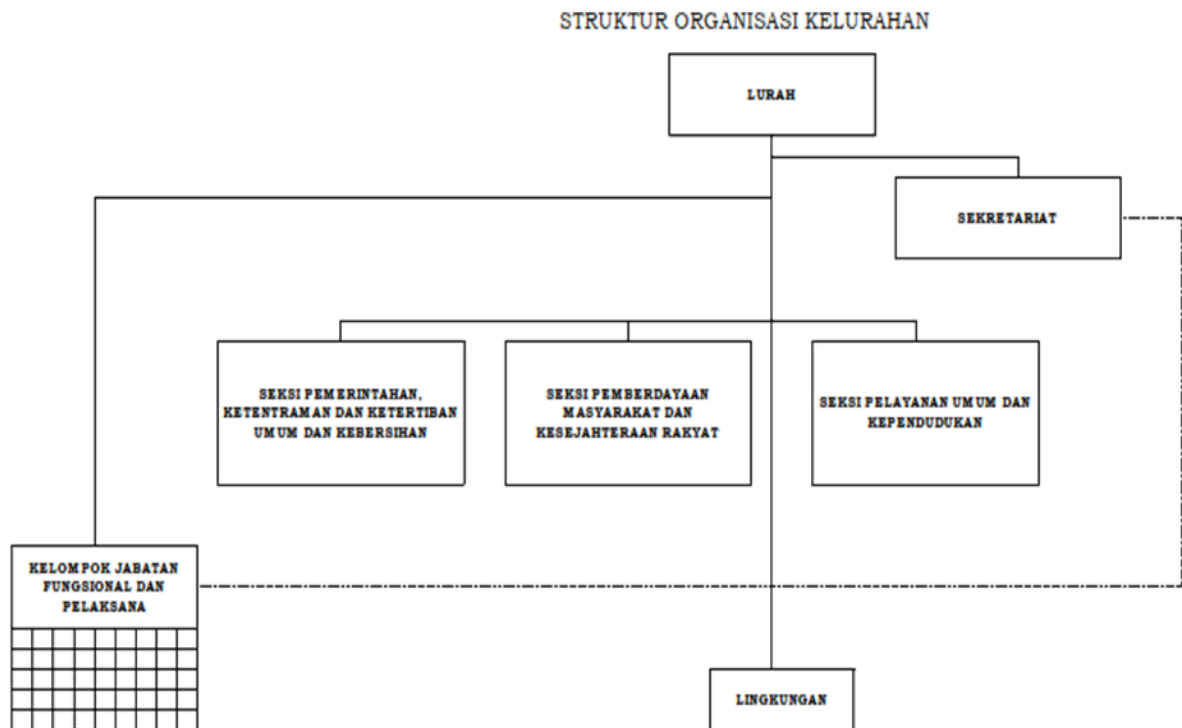
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pemerintahan umum;
- b. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Struktur Kelurahan

Kecamatan Denpasar Utara membawahi 3 (tiga) kelurahan : Kelurahan Ubung, Kelurahan Tonja dan Kelurahan Peguyangan yang secara administratis dikoordinasikan oleh Camat. Untuk struktur organisasi kelurahan dapat dilihat pada bagan struktur organisasi kelurahan dibawah ini :



Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil dibawah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efesiensi dan peningkatan akuntabilitas.

B. Fungsi Kelurahan

Dalam menyelenggarakan tugas, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d. membina lembaga kemasyarakatan;
- e. membina dan mengendalikan administrasi warga;
- f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata kerja adalah aturan mengenai cara unit-unit organisasi bekerja sama, berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. **Struktur Organisasi** adalah kerangka/wadah maka **Tata Kerja** adalah cara atau bagaimana organisasi itu bergerak/bekerja.

Tata kerja Kecamatan Denpasar Utara mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Koordinasi Horizontal dan Vertikal** : Camat melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Kepolisian/TNI di Tingkat Wilayah Kecamatan,
2. **Sistem Kerja Digital** : pelaksanaan tugas wajib mengintegrasikan sistem digital Kota Denpasar untuk mendukung transparansi kinerja,
3. **Akuntabilitas** : setiap unit kerja bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui pelaporan berkala berjenjang.

1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

1.3.1. Aspek Strategis

Visi Pemerintah Kota Denpasar “**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**” dan dijabarkan secara konkrit ke dalam Misi Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana;
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik (**Good Governance**);
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan Pembangunan berbasis **Tri Hita Karana**;
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu instansi pemerintah di Kota Denpasar, dalam pengukuran kinerja berperan strategis dalam mendukung Misi Ke-3 Kota Denpasar “**Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)**”. Aspek strategis Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 2026 berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis digital untuk mendukung visi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya. Beberapa aspek strategis tersebut meliputi :

- **Pusat Penyangga Pemukiman dan Jasa** : Denpasar Utara berfungsi sebagai wilayah transisi antara pusat kota dengan daerah penyangga (Badung), menjadikannya lokasi strategis untuk pengembangan sektor jasa, perdagangan, dan perumahan,
- **Optimalisasi Pelayanan Publik (Paten)** : keberadaan desa adat yang kuat menjadi modal sosial dalam menjaga stabilitas keamanan dan pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi,

- **Ketahanan Sosial dan Budaya** : keberadaan desa adat yang kuat menjadi modal sosial dalam menjaga stabilitas keamanan dan pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi,
- **Pemberdayaan Ekonomi Lokal** : Pengembangan UMKM melalui sinergi dengan BUMDes dan optimalisasi potensi lokal di desa/kelurahan se-Kecamatan Denpasar Utara.

1.3.2. Permasalahan Utama

Berdasarkan analisis situasi lapangan dan target kinerja, berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Denpasar Utara :

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia** : rasio jumlah staf dibandingkan dengan volume pelayanan dan perizinan yang terus meningkat setiap tahunnya.

2. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- **Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber** : tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga guna mendukung optimalisasi TPS3R di wilayah Denpasar Utara,
- **Daya Tampung Drainase** : masalah genangan air di beberapa titik rawan saat musim hujan akibat sedimentasi dan penyempitan saluran drainase seiring pesatnya pembangunan pemukiman.

3. Sosial dan Pemberdayaan

- **Ketimpangan Ekonomi** : upaya pemulihan ekonomi UMKM yang belum sepenuhnya stabil dan merata,
- **Masalah Sosial Perkotaan** : meningkatnya dinamika penduduk pendatang yang memerlukan pengawasan administrasi kependudukan (sidak penduduk non-permanen) secara lebih intensif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Lanjut Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 450);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.5. Sitematik

Sistematik penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sitematik

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Rencana Kerja (Renja)
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Denpasar Utara
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2025 DAN IKU 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara merupakan dokumen perencanaan bersifat dinamis namun terukur. Tahun 2025 fokus utama diarahkan pada pencapaian target-target akhir periode Renstra dengan penekanan pada kualitas layanan dan penguatan fungsi koordinasi kewilayahan. Tujuan utama Kecamatan Denpasar Utara **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”** hal ini diukur melalui sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
 - Analisis Target : pada tahun 2025 target survey kepuasan masyarakat ditetapkan sebesar 93,16. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (80,00 pada tahun 2022).
 - Strategi : untuk mencapai angka 93,16 yang masuk dalam kategori “Sangat Baik” merupakan target yang membutuhkan kerja keras seluruh jajaran staf, mengingat adanya perubahan standar keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di era digital ini.
2. Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi yang terlaksana,
 - Analisis Target : sejalan dengan komitmen dari tahun 2022 hingga 2024, target pada tahun 2025 tetap dipertahankan sebesar 100%.
 - Strategi : capaian ini diupayakan melalui sinkronisasi program kerja lintas sektoral, terutama dalam penanganan isu strategis kota seperti penanggulangan sampah dan keamanan wilayah.
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang dibina,
 - Analisis Target : target pada tahun 2025 adalah pembinaan terhadap 8 desa jumlah ini bersifat konsisten (statis) dari tahun ke tahun karena mencakup seluruh desa yang berada di bawah lingkup administratif Kecamatan Denpasar Utara

- Strategi : fokus pembinaan pada tahun 2025 akan diarahkan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta sinkronisasi arah pembangunan desa agar selaras dengan rencana pembangunan daerah Kota Denpasar.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Utara disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,00	83,00	86,00	93,16
2		Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	8	8	8	8

2.2. Rencana Kerja (RENJA)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 disusun sebagai pedoman operasional tahunan untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Denpasar Utara. Renja tahun 2025 difokuskan pada penguatan tata kelola birokrasi yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat perkotaan.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut adalah penjabaran rencana kerja berdasarkan indikator kinerja yang menjadi fokus pada tahun 2025 seperti dijabarkan pada tabel dibawah :

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah nilai survey	93,16
2		Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	Persentase (%)	100
3		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah desa	8

Pada tahun 2025, Kecamatan Denpasar Utara berkomitmen penuh dalam mewujudkan tujuan strategis yaitu “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**” Upaya ini diukur melalui tiga sasaran utama dengan rincian capaian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran, sasaran meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berhasil mencapai target yang ditetapkan. Indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan angka 93,34 dengan target 93,16, hal ini mencerminkan Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap transparansi, kecepatan, dan keramahan prosedur pelayanan di kantor kecamatan denpasar utara,
2. Dalam rangka Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah, Kecamatan mencatatkan capaian 100% pada indikator Persentase koordinasi yang terlaksana dengan target 100%. Seluruh pertemuan lintas sektor, sinkronisasi program, dan rapat koordinasi kewilayahan telah dilaksanakan secara tuntas, sehingga **ego sektoral** dapat diminimalisir dan implementasi kebijakan di Tingkat kecamatan berjalan selaras,
3. Sebagai bentuk fungsi pembinaan wilayah, sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah terpenuhi dengan capaian 8 desa yang dibina. Melalui program ini, perangkat desa mendapatkan pendampingan intensif terkait administrasi keuangan, pelaporan, dan tata kelola regulasi, guna memastikan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 oleh para pejabat sebagai penerima Amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan Masyarakat guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih efektif dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Perjanjian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capainya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
- d. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Denpasar Utara menetapkan sasaran strategis yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. Adapun rincian target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
 - Indikator Kinerja Utama : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Target : 93,16 (Jumlah nilai survey)

- Narasi : target ini ditetapkan untuk memastikan standar pelayanan minimal di Tingkat kecamatan berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan warga 11 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Denpasar Utara.
2. Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Utama : Persentase koordinasi yang terlaksana
 - Target : 100%
 - Narasi : komitmen ini bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral antar seksi dan memastikan seluruh program kerja kewilayahan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar.
3. Sasaran : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Indikator Kinerja Utama : Jumlah Desa yang dibina
 - Target : 8 Desa
 - Narasi : meliputi pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat desa.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai akumulasi survey kepuasan masyarakat
Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	Persentase (%)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah desa terbina

Untuk memastikan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tercapai secara efektif, Kecamatan Denpasar Utara menerapkan mekanisme pembagian peran melalui **Matrik Peran Hasil (MPH)**. Keterkaitan antara keduanya merupakan manifestasi dari strategi pencapaian kinerja yang bersifat hierarkis dan terintegrasi, dapat dilihat pada data Matrik Peran Hasil Kecamatan Denpasar Utara dibawah ini :

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
1	Penata Layanan Operasional	I MADE SADU GUNAWAN, S. AP.	198610172025211008	Peningkatan pengawasan dan pemantauan Pencilonan/Pengangkatan Perbekel, BPD, Perangkat Desa, dan Kepala Lingkungan	Tersedianya dokumen Pengawasan dan Pemantauan Pencilonan/Pengangkatan Perbekel, BPD dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen pencilonan/pengangkatan Perbekel, BPD dan Perangkat Desa yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pencilonan/pengangkatan Perbekel, BPD dan Perangkat Desa dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pencilonan/pengangkatan Perbekel, BPD dan Perangkat Desa	1 Tahun
				Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen pelaksanaan perayaan Bulan Bung Karno dan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah dokumen pelaksanaan perayaan Bulan Bung Karno dan Wawasan Kebangsaan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pelaksanaan perayaan Bulan Bung Karno dan Wawasan Kebangsaan dengan Perwali Denpasar No.36 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Bulan Bung Karno dan Wawasan Kebangsaan	1 Bulan
				Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dengan PP No.17 Tahun 2018 dan PP No.12 Tahun 2022	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
2	Penata Layanan Operasional	I KADEK AGUS RIAWAN SE	198107092025211009	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pertanahan dan batas-batas wilayah	Tersedianya dokumen fasilitasi pertanahan	Jumlah dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah dengan PP No.18 Tahun 2021 dan Permendagri No.45 Tahun 2016	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen - dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah	1 bulan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
3	Penata Layanan Operasional	I WAYAN EKA SANTIKA, S.H.	198809272025211026	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pertanahan dan batas-batas wilayah	Tersedianya dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah	Jumlah dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah dengan PP No.18 Tahun 2021 dan Permendagri No.45 Tahun 2016	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen - dokumen fasilitasi pertanahan dan batas-batas wilayah	1 Bulan
				Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan konsep Keputusan	Jumlah dokumen fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan konsep Keputusan	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan Konsep Keputusan dengan UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan konsep Keputusan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Tersedianya dokumen agenda surat masuk dan keluar sesuai SK Penunjukan Petugas Kearsipan Nomor 100.3.3/02/DENUT/2026	Laporan	1 Dokumen				
4	Kepala Seksi Pemerintahan	IDA AYU MADE MARGARINI, S.Sos., MAP.	197905061999032002	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan pengawasan dan pemantauan Pencalonan/Pengangkatan Perbekel, BPD, Perangkat Desa, dan Kepala Lingkungan	Jumlah dokumen pencalonan/pengangkatan Perbekel, BPD, Perangkat Desa, dan Kepala Lingkungan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pencalonan/pengangkatan Perbekel, BPD, Perangkat Desa, dan Kepala Lingkungan dengan PP No.47 Tahun 2015 dan Perda No.2 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pencalonan/pengangkatan Perbekel, BPD, Perangkat Desa, dan Kepala Lingkungan	1 Tahun
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan PP No.17 Tahun 2018 dan PP No.12 Tahun 2022	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1 Bulan
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pertanahan dan batas-batas wilayah	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi pertanahan dan batas wilayah yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi pertanahan dan batas wilayah dengan PP No.18 Tahun 2021 dan Permendagri No.45 Tahun 2016	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi pertanahan dan batas wilayah	1 Tahun

				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
				Terlaksananya Tugas Direktif Pimpinan	Menjadi PPTK sesuai SK Camat Denpasar Utara Nomor 100.3.3/97/DENUT/2025	Laporan	1 Laporan				
NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
5	Penata Layanan Operasional	EKA SUTRISNA ARMADI, SE	198506132025211004	Peningkatan pengawasan dan pemantauan Pencalonan/Pengangkatan Perbekel, BPD, Perangkat Desa, dan Kepala Lingkungan	Tersedianya dokumen Pengawasan dan Pemantauan Pencalonan/Pengangkatan Kepala Lingkungan	Jumlah dokumen pencalonan/pengangkatan Kepala Lingkungan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pencalonan/pengangkatan Kepala Lingkungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pencalonan/pengangkatan Kepala Lingkungan	1 Tahun
				Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen pelaksanaan Perayaan Hari Besar Nasional HUT Kota dan HUT RI	Jumlah dokumen pelaksanaan perayaan HUT Kota dan HUT RI	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pelaksanaan perayaan HUT Kota dan HUT RI dengan Perwali Denpasar No.36 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Bulan Bung Karno dan Wawasan Kebangsaan	1 Bulan
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	I WAYAN SARJANA YASA, S.TP.	196908112009031001	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Terkelolanya dokumen pelayanan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen laporan pelayanan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pelayanan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan Permendagri No.4 Tahun 2010	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan pelayanan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan	1 Bulan
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Terkelolanya dokumen laporan data penduduk	Jumlah dokumen laporan penduduk yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pelayanan dan data serta laporan penduduk dengan PP No.40 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pelayanan dan data serta laporan penduduk	1 Bulan
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Terkelolanya dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat dengan Perpres No.76 Tahun 2013	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Bulan
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Terkelolanya dokumen informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen data dan informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen data dan informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat dengan PP No.61 Tahun 2010, Permenpan RB No.14 Tahun 2017	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen data dan informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
				Terlaksananya Tugas Direktif Pimpinan	Menjadi PPTK sesuai SK Camat Denpasar Utara Nomor 100.3.3/97/DENUT/2025	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
7	Penelaah Teknis Kebijakan	ANAK AGUNG SAGUNG ERRY ERDYAWATHY, S.H	198712162022032003	Terkelolanya dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat	Tersedianya dokumen data dan laporan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen data dan laporan pengaduan masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen data dan laporan pengaduan masyarakat dengan Perpres No.76 Tahun 2013	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen data dan laporan pengaduan masyarakat	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya dokumen informasi publik	Jumlah dokumen informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat dengan PP No.61 Tahun 2010, Permenpan RB No.14 Tahun 2017	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat	1 Bulan
8	Penelaah Teknis Kebijakan	I NYOMAN SUTARYA, S.AP	197712312007011086	Terkelolanya dokumen pelayanan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan	Tersedianya dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang non perizinan	Jumlah dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang no perizinan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang non perizinan dengan Permendagri No.4 Tahun 2010	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang non perizinan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen laporan data penduduk	Tersedianya dokumen laporan data penduduk Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen laporan penduduk yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan penduduk dengan PP No.40 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam menyusun dokumen laporan penduduk	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
9	Penata Layanan Operasional	NIKADEK DWI ANTARI, SE	199207152025212008	Terkelolanya dokumen data dan informasi publik serta Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Permenpan RB No.14 Tahun 2017	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Tersedianya tugas sebagai petugas kearsipan sesuai SK Penunjukan Petugas Kearsipan Nomor 100.3.3/02/DENUT/2026	Dokumen Agenda Surat	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen agenda surat masuk dan surat keluar sesuai SK Penunjukan Petugas Kearsipan Nomor 100.3.3/02/DENUT/2026	100	Tingkat ketepatan waktu penyediaan dokumen agenda surat masuk dan surat keluar	1 Bulan
10	Penata Layanan Operasional	NI WAYAN HARTATIK HERNAWATI, S.T.	197802072025212003	Terkelolanya dokumen pelayanan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan	Tersedianya dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang perizinan	Jumlah dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang perizinan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang perizinan dengan Permendagri No.4 Tahun 2010	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen data dan laporan pelayanan masyarakat bidang perizinan	1 Bulan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan	ASPEK			
				RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
11	Sekretaris	IGUSTI NGURAH ARNAWA, SE	197808292000031004	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan	Jumlah dokumen kinerja urusan perencanaan dan keuangan yang telah tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen urusan perencanaan dan keuangan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen kinerja urusan perencanaan dan keuangan	1 Bulan
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Urusan Umum dan Kepegawaian	Jumlah dokumen kinerja urusan umum dan kepegawaian yang telah tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen urusan umum dan kepegawaian dengan PP No.17 Tahun 2020, Permenpan RB No.6 Tahun 2022	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen kinerja urusan umum dan kepegawaian	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	NIPUTU SUWASTINI, SE	196902162010012003	Peningkatan Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan	Terkelolanya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan RPJMD	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Bulan
				Peningkatan Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	6 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
13	Penelaah Teknis Kebijakan	NIWAYAN ADNYANI, S.Sos	197403252008012008	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya laporan SPJ Gaji dan TPP ASN beserta Upah Pegawai Non ASN	Jumlah dokumen SPJ Gaji dan TPP ASN beserta upah Pegawai Non ASN yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan SPJ Gaji dan TPP ASN beserta upah Pegawai Non ASN	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya laporan SPJ Tunjangan lainnya (Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan)	Jumlah dokumen SPJ Tunjangan lainnya (Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan) yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan SPJ Tunjangan lainnya (Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan)	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Laporan Perpajakan ASN dan Daftar Potong Pegawai	Jumlah dokumen Perpajakan ASN dan Daftar Potong Pegawai yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Perpajakan ASN dan Daftar Potong Pegawai	1 Bulan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK						
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target	
14	Pengadministrasi Perkantoran	IDA KADE PUJA ADNYANA	197105172009031003	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen SPP, SPM dan SPJ terkait LS dan GU, termasuk kelengkapan pendukung lainnya	Jumlah dokumen SPP dan SPM terkait LS dan GU, termasuk kelengkapan pendukung lainnya yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen SPP dan SPM terkait LS dan GU, termasuk kelengkapan pendukung lainnya	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Rekapitulasi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP	Jumlah dokumen Rekapitulasi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Rekapitulasi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UP	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Dokumen Pendukung Laporan Keuangan pada Sistem SIPD	Jumlah dokumen bahan Laporan Keuangan pada Sistem SIPD yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan					
15	Pengadministrasi Perkantoran	NIMADE SWESTI	197502161994022001	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Dokumen Pendukung Laporan Keuangan berupa Buku Kas Tunai, Buku Kas Umum, Bukti Potong dan e-billing	Jumlah dokumen Pendukung Laporan Keuangan berupa Buku Kas Tunai, Buku Kas Umum, Bukti Potong dan e-billing yang tersusun	2 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	"Tersedianya Laporan Verifikasi Kelengkapan dan Pembayaran SPJ Kecamatan beserta Kelurahan "	Jumlah dokumen Tersedianya Laporan Verifikasi Kelengkapan dan Pembayaran SPJ Kecamatan beserta Kelurahan yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Laporan Realisasi GU	Jumlah dokumen Realisasi GU yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
16	Pengadministrasi Perkantoran	IDA AYU PUTU SUGIARTINI	197004022007012036	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Arsip SPJ LS dan GU	Jumlah dokumen Arsip SPJ LS dan GU yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen arsip dan register Surat Keluar dan Surat Masuk	Jumlah dokumen arsip dan register Surat Keluar dan Surat Masuk yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Register Pengeluaran SP2D dan hasil verifikasi Nomor SPM, SPP, dan kode rekening	Jumlah dokumen Register Pengeluaran SP2D dan hasil verifikasi Nomor SPM, SPP, dan kode rekening yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
17	Penata Layanan Operasional	IGUSTI AGUNG PANCAMA WEDA	200011262025211001	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen TEPR	Jumlah dokumen TEPR yang tersusun "	"1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen TEPR dengan LAKIP	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen TEPR	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Pelaporan Dokumen SPJ Fungsional beserta dokumen pendukungnya	Jumlah Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional beserta dokumen pendukungnya yang tersusun	"1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Dokumen Pendukung Laporan Keuangan pada Karma Simanis dan Simak Dihati	Jumlah Dokumen Pendukung Laporan Keuangan yang tersusun	"1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
18	Penata Layanan Operasional	PUTU IRMA SULIYANTARI, S.H	199808012025212012	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Realisasi UP GU, LRA dan P3DN	Jumlah dokumen Realisasi UP GU, LRA dan P3DN yang tersusun	1 Dokumen "	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen arsip dan register Surat Keluar dan Surat Masuk	Jumlah dokumen arsip dan register Surat Keluar dan Surat Masuk yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Daftar Potong BPJS Kesehatan beserta dokumen pendukung lainnya	Jumlah dokumen Daftar Potong BPJS Kesehatan beserta dokumen pendukung lainnya yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
19	Penata Layanan Operasional	KADEK DWIK INDAH SARI	199511222025212002	Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Keuangan pada SIPD Aklap	Jumlah dokumen Keuangan pada SIPD Aklap yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Pelaporan Pajak Belanja	Jumlah dokumen Pelaporan Pajak GU dan LS yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya Laporan dan Dokumen Pendukung Perpajakan	Jumlah Laporan dan Dokumen Pendukung Perpajakan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
20	Penata Layanan Operasional	I WAYAN BUDI JUNIARDANA	199406232025211016	Terkelolanya dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan berupa RKA, DPA dan DPPA Perubahan dan dokumen pendukung laporan perencanaan anggaran lainnya	Jumlah dokumen perencanaan berupa RKA, DPA dan DPPA Perubahan dan dokumen pendukung laporan perencanaan anggaran lainnya yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen data usulan program dan kegiatan dengan RENSTRA dan RENJA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Pendukung Laporan Perencanaan pada Sistem SIPD dan SIRUP	Jumlah dokumen Pendukung Laporan Perencanaan pada Sistem SIPD dan SIRUP yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Realisasi PBJ dan RUP	Jumlah dokumen Realisasi PBJ dan RUP yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan DPA	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	"1 Bulan "

				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
21	Pengelola Layanan Operasional	Ni Made Kerthi Asih, Amd.Kom	198401072025212017	Terkelolanya dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan berupa RENSTRA, RENJA, Pohon Kinerja, Cascading, IKU, Rencana Aksi Hasil Reviu, Manajemen Resiko, dan PPBR	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun "	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan RPJMD	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Pendukung Laporan perencanaan pada Sistem SIPD Rentra beserta penyebaran data melalui media elektronik	Jumlah dokumen Pendukung Laporan perencanaan pada Sistem SIPD Rentra beserta penyebaran data melalui media elektronik yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan RPJMD	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen keuangan dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen Keuangan berupa LKJIP dan SPIP	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen keuangan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
22	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	NIPUTU YUNI EKAYANTI, SE.,MM	197306011994032003	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Terkelolanya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Musyawarah Pembangunan Kecamatan dengan PP No.40 Tahun 2006	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Bulan
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Terkelolanya dokumen lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen lomba desa dan kelurahan yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen lomba desa dan kelurahan dengan Permendagri No.81 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen lomba desa dan kelurahan	1 Bulan
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Terkelolanya dokumen Profil Kecamatan	Jumlah dokumen Profil Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Profil Kecamatan dengan PP No.17 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Profil Kecamatan	1 bulan
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Jumlah dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1 Bulan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Jumlah dokumen verifikasi dana desa yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen verifikasi dana desa dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen verifikasi dana desa	1 Bulan
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan
23	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan	I NYOMAN SUDARMA, SH	196805072000031004	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan kegiatan pendataan penduduk non permanen	Jumlah dokumen pendataan penduduk non permanen yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pendataan penduduk non permanen dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pendataan penduduk non permanen	1 Bulan
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan penanganan laporan pelanggaran perda	Jumlah dokumen penanganan laporan pelanggaran perda yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen penanganan laporan pelanggaran perda dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penanganan laporan pelanggaran perda	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
24	Penelaah Teknis Kebijakan	I WAYAN SUITA, S.AP	196811042009061001	Peningkatan penanganan laporan pelanggaran perda	Tersedianya dokumen penanganan laporan pelanggaran perda	Jumlah dokumen penanganan laporan pelanggaran perda yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen penanganan laporan pelanggaran perda dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen penanganan laporan pelanggaran perda	1 Bulan
				Peningkatan kegiatan pendataan penduduk non permanen	Tersedianya dokumen laporan pendataan penduduk non permanen	Jumlah dokumen laporan pendataan penduduk non permanen yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan pendataan penduduk non permanen dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan pendataan penduduk non permanen	1 Bulan
				Peningkatan penanganan laporan pelanggaran perda	Tersedianya dokumen laporan kegiatan penertiban	Jumlah dokumen laporan kegiatan penertiban yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan penertiban dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan kegiatan penertiban kebersihan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
25	Penelaah Teknis Kebijakan	NI PUTU BUDI SANTIKASARI, S.IP	199303312020122006	Terkelolanya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya dokumen usulan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Musyawarah Pembangunan Kecamatan dengan PP No.40 Tahun 2006	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen lomba desa dan kelurahan	Tersedianya dokumen persiapan dan evaluasi lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen lomba desa dan kelurahan yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen lomba desa dan kelurahan dengan Permendagri No.81 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen lomba desa dan kelurahan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen data, rekapitulasi data, dan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen Profil Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Profil Kecamatan dengan PP No.17 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Profil Kecamatan	1 Bulan
				Terseleenggaranya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Tersedianya dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Jumlah dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Tersedianya dokumen verifikasi dan evaluasi APBDes	Jumlah dokumen verifikasi dana desa yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen verifikasi dana desa dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen verifikasi dana desa	1 Bulan

				Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan
NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
26	Penata Layanan Operasional	NI WAYAN WINDY GERHANA PUTRI, S. AP.	199702172025212005	Peningkatan kegiatan pendataan penduduk non permanen	Tersedianya laporan Sidak Penduduk Non Permanen	Jumlah dokumen pendataan penduduk non permanen yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pendataan penduduk non permanen dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pendataan penduduk non permanen	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
				Terlaksananya Tugas direktif pimpinan	menjadi petugas kearsipan pada seksi trantib sesuai dengan SK 100.3.3/02/DENUT/2026	Laporan	1 Laporan	100	100	1 Bulan	1 Tahun
27	Operator Layanan Operasional	I KADEK SWANDITA	198803292025211005	Peningkatan penanganan laporan pelanggaran perda	Tersedianya dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen laporan kegiatan penertiban yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan penertiban dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan kegiatan penertiban kebersihan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
28	Penata Layanan Operasional	I MADE ADI DARMAWAN, SE	199412152025211037	Peningkatan penanganan laporan pelanggaran perda	Tersedianya dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Perda	Jumlah dokumen laporan kegiatan penertiban yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan penertiban dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan kegiatan penertiban	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
29	Operator Layanan Operasional	I NYOMAN BUDA ANTARA	198507122026211001	Peningkatan kegiatan pendataan penduduk non permanen	Tersedianya Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah Tersedianya Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pendataan penduduk non permanen dengan Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2015	100	Terselesaikannya laporan penduduk non permanen	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK						
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target	
30	Arsiparis Ahli Pertama	IPUTU ANGGI DARMADI, S.Sos	199202112024211005	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Inaktif	Jumlah dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip dinamis dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip dinamis	1 Bulan	
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Statis							
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Vital							
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis							
				pertahankan, dan asah kemampuan untuk dapat selalu memberikan kinerja yang optimal	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah dokumen Arsip Statis	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip statis dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip statis	1 Bulan	
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Vital	Jumlah dokumen Arsip Vital	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip vital dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip vital	1 Bulan	
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip dinamis dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip dinamis	1 Bulan	
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan					
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah dokumen Arsip Statis	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip statis dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip statis	1 Bulan	
				Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Vital	Jumlah dokumen Arsip Vital	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip vital dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip vital	1 Bulan	
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen arsip dinamis dengan Peraturan ANRI No. 10 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan arsip dinamis	1 Bulan					

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
31	Penelaah Teknis Kebijakan	I KOMANG APRIGIYANA, S.IP	199704102022031003	Terkelolanya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya dokumen usulan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen Profil Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Profil Kecamatan dengan PP No.17 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Profil Kecamatan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen lomba desa dan kelurahan	Tersedianya dokumen persiapan dan evaluasi lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen data, rekapitulasi data, dan Profil Kecamatan						
				Terselenggaranya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Tersedianya dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara						
				Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Tersedianya dokumen verifikasi dan evaluasi APBDes						
				Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes						
				Terkelolanya dokumen Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen data, rekapitulasi data, dan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen Profil Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Profil Kecamatan dengan PP No.17 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Profil Kecamatan	1 Bulan
				Terselenggaranya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Tersedianya dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Jumlah dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Tersedianya dokumen verifikasi dan evaluasi APBDes	Jumlah dokumen verifikasi dana desa yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen verifikasi dana desa dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen verifikasi dana desa	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
32	Penelaah Teknis Kebijakan	NILUH PUTU RATIH JULITA MAHARANI, S.IP.	199507012022032010	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan	Terealisasinya pemenuhan absensi kehadiran dalam mengikuti perkuliahan selama pelaksanaan tugas belajar	Presentase kehadiran dalam mengikuti perkuliahan	Presentase Kehadiran Minimal 95 %	Kesesuaian resentase absensi kehadiran dengan realisasi kehadiran	100	Jumlah pertemuan dalam 1 semester	16 pertemuan
				Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan	Terealisasinya pemenuhan absensi kehadiran dalam mengikuti perkuliahan selama pelaksanaan tugas belajar						
				Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan	Terlaksananya Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Pariwisata Universitas Udayana	Indeks prestasi Kumulatif (IPK)	IPK Minimal 3,20	Presentase Kesesuaian Pembelajaran dengan Kurikulum	100	Tingkat Ketepatan Waktu Memperoleh IPK	1 Semester
33	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IGUSTI AYU MADE ARIANI, S.Sos	197106301992032011	Peningkatan Kinerja Urusan Umum dan Kepegawaian	Terkelolanya dokumen administrasi kearsipan dan perpustakaan	Jumlah dokumen administrasi kearsipan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kearsipan dengan Peraturan ANRI No.9 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen administrasi kearsipan	1 Bulan
				Peningkatan Kinerja Urusan Umum dan Kepegawaian	Terkelolanya dokumen administrasi perpustakaan	Jumlah dokumen administrasi perpustakaan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen administrasi perpustakaan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2014	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen administrasi perpustakaan	1 Bulan
				Peningkatan Kinerja Urusan Umum dan Kepegawaian	Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kepegawaian dengan PP No.17 Tahun 2020, Permenpan RB No.6 Tahun 2022	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen urusan kepegawaian	1 Bulan
				Peningkatan Kinerja Urusan Umum dan Kepegawaian	Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Jumlah dokumen administrasi aset dan inventaris yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen aset dan inventaris dengan PP No.28 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen aset dan inventaris	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
34	Penata Layanan Operasional	WAYAN SARIADA, S.M.	199205292025211008	Terkelolanya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya dokumen usulan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Musyawarah Pembangunan Kecamatan dengan PP No.40 Tahun 2006	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen lomba desa dan kelurahan	Tersedianya dokumen persiapan dan evaluasi lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen lomba desa dan kelurahan yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen lomba desa dan kelurahan dengan Permendagri No.81 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen lomba desa dan kelurahan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen data, rekapitulasi data, dan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen Profil Kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Profil Kecamatan dengan PP No.17 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen Profil Kecamatan	1 Bulan
				Terselenggaranya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Tersedianya dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Tersedianya dokumen verifikasi dan evaluasi APBDes						
				Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes						
				Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Tersedianya dokumen verifikasi dan evaluasi APBDes	Jumlah dokumen verifikasi dana desa yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen verifikasi dana desa dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen verifikasi dana desa	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
35	Penata Layanan Operasional	INYOMAN PUTRA WIBAWA, S. E.	199310302025211011	Terkelolanya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya dokumen usulan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen lomba desa dan kelurahan yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen lomba desa dan kelurahan dengan Permendagri No.81 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen lomba desa dan kelurahan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen lomba desa dan kelurahan	Tersedianya dokumen persiapan dan evaluasi lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen Profil Kecamatan	Tersedianya dokumen data, rekapitulasi data, dan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes dengan Permendagri No.20 Tahun 2018	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	1 Bulan
				Terselenggaranya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara	Tersedianya dokumen kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara						
				Terkelolanya dokumen Verifikasi Dana Desa	Tersedianya dokumen verifikasi dan evaluasi APBDes						
				Terkelolanya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes	Tersedianya dokumen hasil pembinaan dan monitoring APBDes						
36	Penelaah Teknis Kebijakan	DESI SETYORINI YUSIADEWI, SE	197412231994032004	Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Terkelolanya kinerja bulanan pada pegawai ASN	Jumlah dokumen laporan kinerja bulanan	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kinerja bulanan sesuai dengan PP No.30 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen laporan kinerja bulanan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Terlaksananya analisa permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaian untuk mewujudkan tujuan organisasi	Jumlah dokumen hasil analisis permasalahan dan penyelesaian kinerja	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen hasil analisis permasalahan dan penyelesaian kinerja sesuai dengan PP No.30 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen hasil analisis permasalahan dan penyelesaian kinerja	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya laporan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier	Jumlah dokumen laporan hasil penilaian kinerja	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan hasil penilaian kinerja sesuai dengan PP No.30 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen laporan hasil penilaian kinerja	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen data kompetensi	Jumlah dokumen kompetensi yang tersusun	4 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kompetensi dengan PP No. 17 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kompetensi	1 Tahun

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
				RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
37	Penelaah Teknis Kebijakan	IMADE YUDATAMA, S.H.	199611022020121004	Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen pengelolaan disiplin pegawai	Jumlah dokumen administrasi pengelolaan disiplin pegawai	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pengelolaan disiplin pegawai dengan PP No.94 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen pengelolaan disiplin pegawai	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya laporan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier	Jumlah dokumen laporan hasil penilaian kinerja	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan hasil penilaian kinerja sesuai dengan PP No.30 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen laporan hasil penilaian kinerja	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kepegawaian	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kepegawaian dengan PP No.17 Tahun 2020, Permenpan RB No.6 Tahun 2022	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen cuti	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
38	Pengadministrasi Perkantoran	IDA AYU PUTU RESIK ATRİYANI	197208071992032007	Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen kenaikan pangkat	Jumlah dokumen kenaikan pangkat yang tersusun	2 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kenaikan pangkat dengan PP No.12 Tahun 2002	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kenaikan pangkat	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen kenaikan gaji berkala	Jumlah dokumen kenaikan gaji berkala yang tersusun	24 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen kenaikan gaji berkala dengan PP No.30 Tahun 2015	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kenaikan gaji berkala	1 Tahun
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen cuti	Jumlah dokumen cuti yang tersusun	5 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen cuti dengan PP No.11 Tahun 2017	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen cuti	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen pensiun	Jumlah dokumen pensiun yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pensiun dengan PP No.19 Tahun 2013	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pensiun	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
39	Pengadministrasi Perkantoran	NI WAYAN MASI HANI	197507202007012025	Terkelolanya dokumen administrasi kearsipan dan perpustakaan	Tersedianya dokumen agenda dan arsip surat masuk	Jumlah dokumen agenda dan arsip surat masuk yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen agenda dan arsip surat masuk dengan Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen agenda dan arsip surat masuk	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kearsipan dan perpustakaan	Tersedianya dokumen agenda dan arsip surat keluar	Jumlah dokumen agenda dan arsip surat keluar yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen agenda dan arsip surat keluar dengan Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen agenda dan arsip surat keluar	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK						
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target	
40	Penelaah Teknis Kebijakan	NI WAYAN SASTRAWATI, S.Ak	199710222022032006	Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	Jumlah dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang tersusun	2 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen KIB dan KIR dengan PP No. 28 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen KIB dan KIR	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya dokumen Barang Inventaris yang dihapuskan	Jumlah dokumen Barang Inventaris yang dihapuskan yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen Barang Inventaris dengan PP No. 28 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen barang inventaris yang dihapuskan	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya dokumen Barang Persediaan	Jumlah dokumen Barang Persediaan yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen Barang Persediaan dengan PP No. 28 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen barang persediaan	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan					
41	Penata Layanan Operasional	KADEK INDAH PRADNYANI, S.E.	199606252025212019	Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya laporan dan kelengkapan SPJ yang telah terverifikasi	Jumlah dokumen kelengkapan SPJ	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen SPJ dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen SPJ	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya dokumen agenda dan arsip surat ke Tersedianya dokumen laporan realisasi belanja luar	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen realisasi belanja dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen realisasi belanjaam penyusunan dokumen agenda dan arsip surat keluar	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan					
42	Penata Layanan Operasional	ANAK AGUNG MADE DITYA UDHIYANA, S.M.	199811292025211006	Terkelolanya dokumen administrasi kearsipan dan perpustakaan	Tersedianya dokumen agenda Proposal yang telah terverifikasi	Jumlah Dokumen dokumen agenda Proposal yang telah terverifikasi	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen agenda dan arsip surat masuk dengan Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan Proposal yang telah terverifikasi	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen data kompetensi	Jumlah dokumen kompetensi yang tersusun	4 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen kompetensi dengan PP No. 17 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kompetensi	1 Tahun
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen kenaikan pangkat	Jumlah dokumen kenaikan pangkat yang tersusun	1 Dokumen		Persentase kesesuaian dokumen kenaikan pangkat dengan PP No.12 Tahun 2002	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kenaikan pangkat	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan					

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
43	Penata Layanan Operasional	IGUSTIAGUNG SURYASANTA, SE	199705152025211008	Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya dokumen laporan mutasi persediaan barang	Jumlah dokumen Barang Persediaan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen Barang Persediaan dengan PP No. 28 Tahun 2020	100	"Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen barang persediaan "	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen aset dan inventaris	Tersedianya dokumen Kartu Persediaan Barang	Jumlah dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen KIB dan KIR dengan PP No. 28 Tahun 2020	100	"Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen KIB dan KIR "	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
44	Penata Layanan Operasional	IMADE ARYA SUGIAWAN, S.Sos.	199207092025211046	Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya laporan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier	Jumlah dokumen laporan hasil penilaian kinerja	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan hasil penilaian kinerja sesuai dengan PP No.30 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen laporan hasil penilaian kinerja	1 Bulan
				Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	terkelola serta tersedianya laporan absensi pegawai	Jumlah dokumen administrasi pengelolaan absensi pegawai	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen pengelolaan absensi pegawai dengan PP No.94 Tahun 2021	100	Tingkat ketepatan waktu dalam pembuatan dokumen pengelolaan absensi pegawai	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
45	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IDA BAGUS MANTRA, SE	197302231994031003	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembinaan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan SKB 4 Menteri Tahun 2014, Permenkes No.29 Tahun 2017, Permenkes No.29 Tahun 2019, Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 2006	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	1 Tahun
				Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, Permensos No.10 Tahun 2019, Permensos No.25 Tahun 2019, Permenag No.28 Tahun 2016, Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	1 Tahun

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan	ASPEK			
				RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
46	Penata Layanan Operasional	NI WAYAN TESA YUMAHARI, S.Pd.H.	199203242025212006	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan SKB 4 Menteri Tahun 2014, Permenkes No.29 Tahun 2017, Permenkes No.29 Tahun 2019, Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 2006, Permendagri No.36 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat	1 Bulan
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, Permensos No.10 Tahun 2019, Permensos No.25 Tahun 2019, Permenag No.28 Tahun 2016	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
47	Penata Layanan Operasional	IPUTU WAHYUNTA SUGENIARSA, S.H.	199202292025211006	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan SKB 4 Menteri Tahun 2014, Permenkes No.29 Tahun 2017, Permenkes No.29 Tahun 2019, Perda Propinsi Bali No.3 Tahun 2006, Permendagri No.36 Tahun 2020	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat	1 Bulan
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya dengan Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
48	Penata Layanan Operasional	IDA BAGUS ADHI PRABAWA NANDA	199009232025211018	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak	Jumlah dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2002	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak	1 Bulan
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, Permensos No.10 Tahun 2019, Permensos No.25 Tahun 2019, Permenag No.28 Tahun 2016	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				
49	Penata Layanan Operasional	ANAK AGUNG AYU GAYATRI, S.H.	199904262025212017	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak	Jumlah dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2002	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak	1 Tahun
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, Permensos No.10 Tahun 2019, Permensos No.25 Tahun 2019, Permenag No.28 Tahun 2016	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial	1 Tahun
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

NO.	NAMA JABATAN	NAMA PEGAWAI	NIP	RENCANA KINERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK					
						Indikator Kuantitas	Target	Indikator Kualitas	Target	Indikator Waktu	Target
50	Pengadministrasi Perkantoran	NIKETUT KERMINI	197607292025212008	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak	Jumlah dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak dengan Permendagri No.36 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2002	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan anak	1 Bulan
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Sosial, Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya yang tersusun	1 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Kader Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya dengan Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019	100	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen fasilitasi dan koordinasi kegiatan Lembaga Adat, Lembaga Seni dan Budaya	1 Bulan
				Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Terlaksananya tugas direktif pimpinan	Laporan	1 Laporan				

Penjelasan dari Matrik Peran Hasil (MPH) tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Penjabaran Target Strategis (*Cascading Performance*)** target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat (Nilai SKM 93,16, Koordinasi 100%, dan Pembinaan 8 Desa) tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan semata, namun diintervensi oleh seluruh lini melalui matrik peran hasil. Matrik ini merinci kontribusi setiap jabatan (Sekretaris, para Kepala Seksi dan Sub Bagian hingga pelaksana/Staf) terhadap pencapaian indikator strategis tersebut,
- 2. Sinkronisasi Peran antar Unit Kerja**, penggunaan matrik peran hasil memastikan bahwa sasaran Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah benar-benar terlaksana di Tingkat operasional. Matrik Peran Hasil berfungsi memetakan siapa melakukan apa, sehingga tumpang tindih tugas antar seksi dapat dihindari dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Denpasar Utara menjadi lebih solid,
- 3. Akuntabilitas Individu terhadap Kinerja Organisasi**, melalui matrik peran hasil setiap aparatur di Kecamatan Denpasar Utara memiliki rencana aksi yang secara langsung mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja.
- 4. Dasar Evaluasi dan Monitoring**, keterkaitan ini memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring berkala. Jika terjadi selisih/penyimpangan pada target Perjanjian Kinerja, matrik peran hasil mempermudah identifikasi pada titik peran mana yang perlu diperkuat atau diperbaiki, sejalan dengan semangat Sewaka Dharma untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di kota Denpasar.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Denpasar Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025. Pada bab ini diuraikan perbandingan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian yang berhasil diraih.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025, sasaran strategis utama Kecamatan Denpasar Utara adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. Secara umum, indeks kinerja kecamatan menunjukkan tren yang sangat positif dengan rincian analisis sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Publik, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur melalui indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - Target : 93,16
 - Realisasi : 93,34
 - Analisis : capaian ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi layanan dan penerapan standar pelayanan prima di Kecamatan Denpasar Utara berjalan efektif. Nilai yang tinggi ini mencerminkan keberhasilan aparatur dalam mengimplementasikan nilai Sewaka Dharma, dimana pelayanan dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel sehingga mendapatkan apresiasi dari warga Denpasar Utara.
2. Koordinasi Perangkat Daerah, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama;
 - Target : 100%
 - Realisasi : 100%
 - Analisis : tercapainya target 100% pada persentase koordinasi yang terlaksana membuktikan hilangnya ego sektoral antar unit kerja. Sinkronisasi melalui rapat koordinasi pimpinan (Rakorpim) dan forum

konsultasi publik telah memastikan seluruh program di Tingkat kecamatan selaras dengan visi Kota Denpasar, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran di lapangan.

3. Pembinaan dan Pengawasan Desa, sebagai wujud fungsi penguatan tata kelola wilayah, Kecamatan melakukan pembinaan intensif terhadap desa-desa di wilayah Kecamatan Denpasar Utara;

- Target : 8 Desa
- Realisasi : 8 Desa
- Analisis : pembinaan dilakukan terhadap seluruh desa (8 desa) terkait administrasi pemerintahan, pengelolaan dana desa, dan pelaporan keuangan. Hasilnya, 8 desa tersebut mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan regulasi, guna mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan meningkatkan kualitas Pembangunan.

1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Analisis capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun berjalan terhadap target yang ditetapkan, serta membandingkannya dengan capaian pada tahun sebelumnya tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk melihat tren konsistensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Berikut adalah tabel perbandingan data kinerja Kecamatan Denpasar Utara :

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,00	93,16	100,17	93,16	93,34	100,19
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	8	8	100	8	8	100

Analisis Perbandingan Capaian :

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat,** Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan tren positif yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 93,34 (100,19% dari target), mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berada di angka 93,16. Kenaikan 0,18 poin ini merefleksikan keberhasilan Kecamatan Denpasar Utara dalam melakukan inovasi layanan dan merespons umpan balik masyarakat secara cepat dan tepat, sejalan dengan semangat *Sewakadarma*,
- 2. Efektivitas Koordinasi Perangkat Daerah,** untuk sasaran koordinasi perangkat daerah, Kecamatan Denpasar Utara berhasil mempertahankan kinerja semua dengan capaian 100% baik pada tahun 2024 maupun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi internal maupun eksternal telah berjalan secara baku, efektif dan konsisten dalam mendukung jalannya roda pemerintahan di tingkat Kecamatan,
- 3. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa,** dalam hal fungsi pembinaan, Kecamatan Denpasar Utara secara konsisten melaksanakan pembinaan terhadap 8 desa (100%) yang ada di wilayahnya. Keberhasilan mempertahankan realisasi ini pada tahun 2025 memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa di wilayah Denpasar Utara tetap terpantau dan terbina sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Sebagai bentuk akuntabilitas yang komprehensif, Kecamatan Denpasar Utara melakukan analisis perbandingan kinerja tahun 2025 terhadap capaian selama lima tahun terakhir. Hal ini dilakukan untuk melihat keberlanjutan program dan efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam jangka menengah, dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.2. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77,00	80,00	83,00	86,00	93.16	90,40	91,00	93,00	93,16	96.34
Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100	100	100	100	100	85,85	92,82	95,47	93,77	100
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8

Pada tabel diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukkan tren kenaikan yang sangat signifikan (positif) dalam kurun waktu lima tahun terakhir :
 - Progresivitas : realisasi SKM terus naik secara stabil dari 90,40 pada tahun 2021 hingga mencapai angka 96.34 pada tahun 2025,
 - Melampaui target : pada tahun 2025, realisasi sebesar 96.34 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 93.16,
 - Analisis : lonjakan kualitas layanan ini merupakan hasil dari konsistensi Kecamatan Denpasar Utara dalam melakukan digitalisasi layanan dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Kebnaikan dari tahun 2024 (93.16) ke tahun 2025 (96.34) menunjukkan komitmen peningkatan berkelanjutan meskipun standar target yang ditetapkan semakin tinggi.
2. Sasaran : Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah, capaian pada indikator persentase koordinasi yang terlaksana menunjukkan grafik pemulihan dan penguatan yang luar biasa :
 - Tren Pemulihan : pada awal periode (2021), realisasi koordinasi berada di angka 85.85%. Namun, melalui perbaikan manajemen internal, angka ini terus meningkat menjadi 92.82% (2022), 95.47% (2023), dan sempat terkoreksi tipis di 93.77% (2024).

- Pencapaian Puncak : pada tahun 2025, Kecamatan Denpasar Utara berhasil mencapai performa maksimal sebesar 100% dari target 100%. Hal ini menandakan bahwa sistem koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait telah mencapai titik optimal dan berjalan sepenuhnya efektif.
3. Sasaran : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, indikator Jumlah Desa yang Dibina menunjukkan konsistensi yang terjaga (kecuali pada tahun pertama periode) :
- Stabilitas Kinerja : sejak tahun 2022 hingga 2025, Kecamatan Denpasar Utara secara konsisten memenuhi target pembinaan terhadap seluruh desa di wilayahnya (8 desa),
 - Analisis : keberhasilan mempertahankan angka 100% (8 dari 8 desa) selama empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa telah menjadi agenda rutin yang terlembaga dengan baik, guna memastikan tata kelola desa di wilayah Denpasar Utara tetap akuntabel.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Denpasar Utara, seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,34	92,00	101,46
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100	100	100
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	8	8	100

Realisasi kinerja Kecamatan Denpasar Utara hingga akhir tahun 2025 menunjukkan progres yang sangat positif dengan seluruh indikator mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Rata-rata tingkat kemajuan indikator berada pada angka 100.48%, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program kerja sepanjang tahun berjalan.

Berdasarkan perencanaan strategis perbandingan realisasi kinerja jangka menengah kecamatan Denpasar Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik : sasaran ini menunjukkan performa yang luar biasa dengan nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) mencapai 93,34. Angka ini tidak hanya memenuhi target tahun 2026 (Renstra Tahun 2021-2026) sebesar 92,00, tetapi melampauinya dengan tingkat kemajuan sebesar 101,46%. Hal ini merefleksikan tingginya kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap inovasi dan standarisasi layanan di Kecamatan Denpasar Utara,
- b. Koordinasi Perangkat Daerah : dalam hal tata kelola internal, indikator persentase koordinasi yang terlaksana mencapai angka sempurna 100%. Seluruh agenda koordinasi antar perangkat daerah telah dijalankan sesuai rencana, yang berdampak langsung pada sinkronisasi kebijakan dan minimalisir hambatan administratif di lapangan,
- c. Pembinaan dan Pengawasan Wilayah : terkait fungsi pembinaan kewilayahan, target jumlah desa yang dibina telah terpenuhi sepenuhnya. Sebanyak 8 desa telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan intensif (capaian 100%). Hal ini menjamin tata kelola pemerintahan desa di wilayah Denpasar Utara tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan norma yang berlaku.

4. Perbandingan (**Benchmark**) Capaian Kinerja dengan Kecamatan Di Kota Denpasar

Benchmark kinerja atau perbandingan kinerja merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengukur dan membandingkan efektivitas kinerja perangkat daerah. Pentingnya benchmark ini terletak pada identifikasi potensi perbaikan dan penerapan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Denpasar Utara.

Data perbandingan capaian kinerja yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Denpasar Utara terhadap kinerja meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kecamatan lainnya di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Denpasar Utara dengan Kecamatan Lainnya di Kota Denpasar

No.	Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Kecamatan Denpasar Barat	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59	97,14	97,16	97,18
2	Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,84%	93,90%	93,88	93,96
3	Kecamatan Denpasar Utara	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,00	93,16	93,16	93,34
4	Kecamatan Denpasar Selatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,79	92,42	92,29	92,56

Secara kolektif, seluruh kecamatan di Kota Denpasar menunjukkan tren positif dalam indeks kepuasan masyarakat. Seluruh kecamatan berhasil melampaui target yang ditetapkan baik pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan.

Analisis perbandingan antar wilayah, sebagai berikut :

- Kecamatan Denpasar Barat : memegang posisi tertinggi dalam hal ini indeks. Pada tahun 2025, realisasinya mencapai 97.18 melampaui target 97.16. Angka ini merupakan nilai kepuasan pelayanan tertinggi dibandingkan tiga kecamatan lainnya,
- Kecamatan Denpasar Timur : menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Pada tahun 2025, nilai SKM mencapai 93.96 dari target 93.88. Realisasi ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 93.90%,
- Kecamatan Denpasar Utara : menampilkan pertumbuhan kinerja yang stabil. Dari target tahun 2025 sebesar 93.16, kecamatan Denpasar Utara berhasil mencatatkan realisasi sebesar 93.34. Terdapat kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang berada pada angka 93.16,

- Kecamatan Denpasar Selatan : meskipun secara angka berada diposisi paling bawah dibandingkan kecamatan yang lain, Denpasar Selatan menunjukkan progres pelampauan target yang konsisten. Pada tahun 2025, realisasinya mencapai 92.56, yang mana angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 92.29.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 3.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,16	93,34	100,19	berhasil	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi mendalam terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih memiliki nilai terendah dalam kuesioner survei untuk dilakukan perbaikan spesifik, - Meningkatkan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan service excellence secara berkala guna menjaga konsistensi kepuasan masyarakat.
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100	berhasil	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi atau platform digital dalam berkoordinasi agar proses pengambilan keputusan antar-perangkat daerah menjadi lebih cepat dan efisien, - Menyusun jadwal koordinasi tematik yang lebih fokus pada penyelesaian hambatan teknis di lapangan.
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	8	8	100	berhasil	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan instrumen pengawasan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah desa, tetapi juga pada kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan dan administrasi

							desa, Mengembangkan instrumen pengawasan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada kuantitas jumlah desa, tetapi juga pada kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan dan administrasi desa.
--	--	--	--	--	--	--	--

Secara keseluruhan, kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan status “**Berhasil**” pada seluruh sasaran strategis. Seluruh indikator kinerja utama telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian berkisar antara 100% hingga 100,19%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja, dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Kecamatan Denpasar Utara didukung oleh beberapa factor strategis yang saling berintegrasi. Keberhasilan ini merupakan hasil optimalisasi sumber daya internal dan pengembangan sistem layanan, antara lain:

1. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja internal didorong oleh pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif. Penambahan perangkat teknologi informasi dan digitalisasi ruang kerja telah mempercepat alur koordinasi serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan di kantor kecamatan.

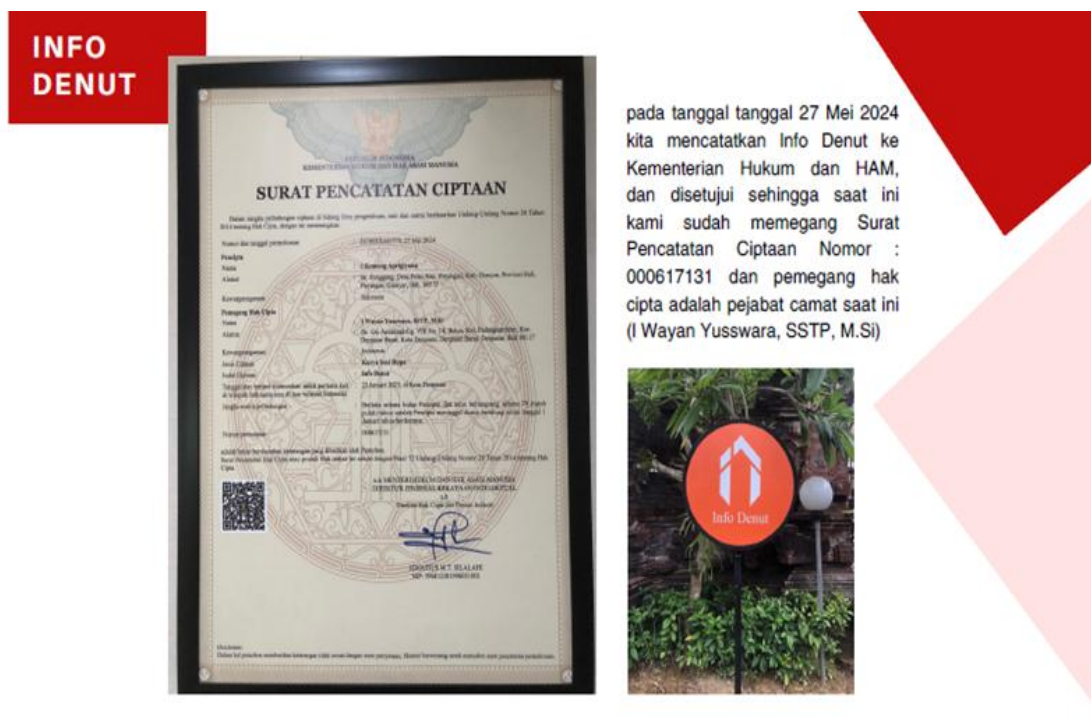
2. Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam pencapaian visi organisasi. Kecamatan Denpasar Utara secara konsisten melakukan pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, workshop tata kelola keuangan, dan bimbingan teknis pelayanan prima. Hal ini memastikan setiap tugas dilaksanakan oleh personel yang kompeten, responsif, dan profesional.

3. Penerapan dan Pengembangan Inovasi

Sebagai langkah akselerasi kinerja, Kecamatan Denpasar Utara mengimplementasikan inovasi digital yang berdampak langsung pada efisiensi birokrasi, beberapa inovasi kecamatan denpasar utara adalah:

1. INFO DENUT Tahun 2023, Kecamatan Denpasar Utara meluncurkan inovasi INFO DENUT yang awalnya hanya sebuah wadah komunikasi dan informasi melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tahun ini platform digital tersebut kami perluas dengan muatan kompilasi informasi publik dan data mengenai Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, yang dapat diakses oleh masyarakat luas seperti jenis pelayanan dan kontak yang dapat dihubungi dalam rangka mendapatkan pelayanan publik. Masyarakat dapat mengakses dengan melakukan scan pada barcode yang telah disiapkan.



2. Inovasi dan Penghargaan : Sistem Pengawasan dan Monitoring Anggaran (Si-PENYU), sebagai bentuk nyata komitmen Kecamatan Denpasar Utara dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pada tahun 2025 diluncurkan inovasi **Si-PENYU** (Sistem Pengawasan Perencanaan dan Penyerapan Realisasi Anggaran di Kecamatan Denpasar Utara). Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah melalui sistem yang terintegrasi secara digital.

Keberhasilan implementasi inivasi ini mendapatkan pengakuan di Tingkat Kota/Provinsi dengan diraihnya Juara II dalam Lomba KIPRAH (Kreativitas dan Inovasi Perangkat Daerah) Tahun 2025. Prestasi ini memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara.





3. PASTI LARIS Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Utara meluncurkan inovasi PASTI LARIS (Pelayanan Fasilitasi Silsilah Waris) yang akan diikuti dalam Inovasi Pemerintah Kota Denpasar. Inovasi ini merupakan pembenahan proses pelayanan Surat Silsilah Keluarga dan Ahli Waris.

PASTI LARIS

Berdasarkan Data pengurusan Surat Silsilah Waris yang perlu revisi/perbaikan pada Juni Tahun 2022, dapat dilihat bahwa tingkat angka pengajuan surat yang masih memerlukan perbaikan sebelum mendapatkan pengesahan dari Camat Denpasar Utara masih terbilang tinggi. Bahkan pelayanan Surat Silsilah Waris pada Desa dan Kelurahan dapat dikatakan belum sinkron dengan Kecamatan, sehingga hal ini menyebabkan seringnya terjadi kesalahan administrasi persuratan yang mengakibatkan pemohon harus mengulang dari awal permohonan suratnya mulai dari Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun, kemudian ke Perbekel/ Lurah dan terakhir kembali lagi ke Kecamatan.



Situasi dan kondisi seperti diatas dapat mempengaruhi turunnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara. Sehingga dipandang perlu untuk merancang sebuah peningkatan kapasitas, sistem atau pelayanan yang dapat memperbaiki proses pelayanan Surat Silsilah Waris from top to bottom.

Maka PASTI LARIS kami hadirkan dalam rangka perbaikan proses pelayanan Surat Silsilah Waris dengan mengadakan Forum Group Discussion secara rutin, peningkatan Sumber Daya Manusia dan menyusun panduan lengkap serta format surat yang kami bagikan kepada aparatur Desa/Kelurahan. Kami juga menghadirkan konsultasi pelayanan melalui Whatsapp demi menunjang pelayanan.

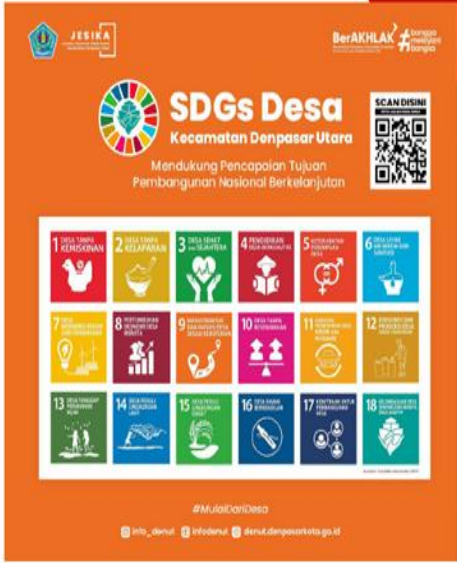




4. JESIKA Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Utara meluncurkan inovasi JESIKA (Jendela Informasi SDGs Kecamatan Denpasar Utara) yang merupakan media informasi yang mudah diakses untuk membantu masyarakat beserta komponen yang ada di Pemerintahan Desa mengetahui informasi dan mengusulkan program prioritas serta mengawasi alokasi Dana Desa.

JESIKA

JESIKA (Jendela Informasi SDGs Kecamatan Denpasar Utara) adalah sebuah media informasi yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan akun informasi resmi instansi Kecamatan dan Desa di Denpasar Utara. Berdasarkan laporan We Are Social (Ivan Mahdi, dataindonesia.id), jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah tersebut telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Berkaca pada data tersebut, penggunaan media sosial menjadi langkah efektif dan efisien dalam penyebarluasan informasi SDGs desa di Kecamatan Denpasar Utara. Efektif yang dimaksud adalah memberikan jangkauan yang luas serta akses yang mudah kepada masyarakat. Kemudian efisiensi dapat tercapai karena tidak memerlukan pendanaan yang tinggi maupun sumber daya dengan jumlah banyak. Media informasi ini kemudian dikemas dalam bentuk media grafis poster digital yang memuat informasi dasar tentang SDGs Desa.



5. LAPOR MASBRO! Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara meluncurkan inovasi LAPOR MASBRO! (Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat Berbasis Online) yang bertujuan melakukan pelayanan pengaduan masyarakat berbasis online melalui aplikasi Whatshap. Manfaatnya memberikan pelayanan yang lebih mudah cepat tanggap.

LAPOR MASBRO!




LAPOR MASBRO! merupakan akronim dari Layanan Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Online. Inovasi ini adalah sebuah wadah pengaduan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara dengan menggunakan aplikasi Whatsapp. Pengaduan akan diterima oleh petugas yang kemudian akan diverifikasi dan ditujukan dengan segera kepada bidang yang menangani permasalahan pengaduan tersebut.

Kecamatan Denpasar Utara sendiri mulai mengaplikasikan pengelolaan pengaduan masyarakat yang dapat diakses di website kecamatan, namun tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan untuk mengakses website dan melayangkan pengaduan maupun menanyakan informasi sehingga data aduan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat sedikit yang masuk ke website. Masyarakat memerlukan aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat dalam memperoleh layanan pengaduan maupun informasi. Maka dari itu LAPOR MASBRO! hadir ke masyarakat hanya dengan melakukan scan barcode pada Instagram @info_denut.





6. SI TARA Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Utara meluncurkan inovasi SI TARA (Digitalisasi Tata Kelola Barang) yang merupakan sebuah perbaikan sistem pelabelan barang pada instansi pemerintah agar menampilkan data barang yang lebih lengkap. Dari label barang yang sebelumnya hanya menampilkan kode barangs aja menjadi menampilkan nama barang, merkbarang, tanggal tahun perolehan, ruang letak barang dan harga perolehan.

SI TARA

SI ANAK PAPI! merupakan akronim dari Digitalisasi Tata Kelola Barang pada Kecamatan Denpasar Utara. Inovasi ini dibuat dalam rangka melengkapi administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga barang lebih mudah dicari dan terdata dengan baik.


Barang akan diberi label yang dilengkapi QR Code, yang apabila di scan akan menampilkan informasi berupa nama barang, merk barang, tanggal tahun perolehan, ruang letak barang dan harga perolehan.





Kode Label

PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR UTARA <small>Jl. Melanawakan No. 1 Telp. (0361) 412292 Email: kecamatan@denpasar.go.id http://www.denpasar.go.id</small>	
12.14.09.04.50.16.01.01 02.06.02.04.003.0008	
NAMA BARANG	A.C. Window
MERK	
RUANG	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
TANGGAL PEROLEHAN	27 Juli 2016
HARGA PEROLEHAN	Rp4.976.110,38



Tampilan Informasi QR Code

7. SI ANAK PAPI Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Utara meluncurkan inovasi SI ANAK PAPI (Sanksi dan Penghargaan Pelaksana Pelayanan Publik) yang merupakan sebuah tindak lanjut dari UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa sanya diberikan sanksi atau penghargaan kepada pelaksana pelayanan publik di suatu organisasi. Berdasarkan hal tersebut kami membuat sebuah sistem penilain berbasis digital berupa Google Form yang dapat di scan (QR Code) oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.



Meskipun capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara secara umum dikategorikan **Berhasil** dengan rata-rata capaian di atas 100%, organisasi tetap mengidentifikasi beberapa tantangan strategis untuk menjamin keberlanjutan kualitas pelayanan di masa depan antara lain:

a. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

Kendala: Walaupun Nilai SKM melampaui target (93,34), masih terdapat fluktuasi kepuasan pada unsur-unsur pelayanan tertentu yang bersifat teknis, serta tantangan dalam menjaga konsistensi keramahan petugas di tengah beban kerja yang tinggi.

Solusi:

- Melakukan evaluasi mendalam pada unsur kuesioner dengan nilai terendah untuk perbaikan spesifik.
- Melaksanakan pelatihan pelayanan prima secara berkala bagi petugas garda terdepan guna menjaga standar layanan prima.

b. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah

Kendala: Walaupun koordinasi antar unit kerja secara administratif telah berjalan sesuai prosedur, masih ditemukan tantangan dalam hal sinkronisasi data riil dan kecepatan respon kolektif terhadap permasalahan lintas sektor (seperti penanganan drainase atau ketertiban umum). Adanya ego sektoral yang sesekali muncul serta perbedaan prioritas antar instansi dapat menghambat akselerasi program yang membutuhkan penanganan terpadu.

Solusi:

- Membangun sistem komunikasi informasi terpadu yang lebih responsif untuk meminimalkan sekat birokrasi antar perangkat daerah.
 - Mengintensifkan forum koordinasi rutin yang bersifat solusi teknis guna menyepakati pembagian peran (siapa berbuat apa) pada program-program strategis yang memiliki irisan kewenangan.
- c. Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Kendala: Meskipun pengawasan terhadap administrasi desa telah mencapai target, tantangan utama terletak pada ketimpangan atau keberagaman kemampuan di tingkat desa dalam mengadaptasi regulasi terbaru serta kompleksitas dalam tata kelola keuangan desa yang semakin dinamis. Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan kecamatan memerlukan pengawalan yang lebih intensif agar tetap selaras.

Solusi:

- Mengembangkan pola pembinaan melalui pendampingan klinis (coaching) secara berkelanjutan, tidak hanya sekadar pemeriksaan administratif di akhir tahun anggaran.
- Mengoptimalkan fungsi supervisi berbasis mitigasi risiko untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi pengawasan lokal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Secara keseluruhan, Kecamatan Denpasar Utara telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam merealisasikan anggaran tahun bersangkutan. Berdasarkan rasio antara capaian kinerja fisik dengan realisasi keuangan, dapat disimpulkan bahwa organisasi telah mencapai tingkat efisiensi yang optimal dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perbandingan Output Fisik dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Denpasar Utara berhasil mencapai rata-rata kinerja fisik 100% sementara serapan anggaran 93,98% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan

terjadinya efisiensi biaya, dimana target sasaran strategis tetap terpenuhi meskipun terdapat sisa anggaran (**Silpa**) yang berasal dari penghematan belanja penunjang;

b. Sumber Efisiensi Strategis

Efisiensi ini bukan merupakan dampak dari tidak terlaksananya kegiatan, melainkan hasil dari beberapa langkah strategis :

- Optimalisasi Digitalisasi: Pengalihan sebagian proses administrasi dan koordinasi ke sistem digital (paperless) serta pemanfaatan rapat virtual untuk koordinasi internal yang memangkas biaya alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi;
- Skala Prioritas Belanja: Penerapan kebijakan pengetatan belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga anggaran dapat difokuskan pada unit layanan garda terdepan;
- Sinergi Lintas Sektor: Melalui koordinasi solutif-tematik, beberapa kegiatan lapangan dilakukan secara kolaboratif dengan perangkat daerah lain atau pihak swasta (CSR), sehingga biaya operasional yang dikeluarkan kecamatan menjadi lebih hemat tanpa mengurangi kualitas hasil.

c. Analisis Efektivitas Biaya (Cost-Effectiveness)

Dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 93,34, biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit pelayanan publik dinilai sangat kompetitif. Setiap Rupiah yang dibelanjakan telah terkonversi menjadi kepuasan layanan yang nyata bagi masyarakat Denpasar Utara;

d. Keberlanjutan Efisiensi

Organisasi terus berkomitmen untuk melakukan review berkala terhadap Standar Satuan Harga dan mengevaluasi relevansi setiap komponen belanja terhadap tujuan strategis. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya habis terserap, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan wilayah.

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran, secara umum Kecamatan Denpasar Utara telah menunjukkan korelasi yang positif antara penyerapan anggaran dengan tingkat keberhasilan sasaran strategis, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6. Target, Realisasi, dan Capaian berdasarkan Indikator Kinerja Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian%	
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	93,16	93,34	100,19	31.358.000	29.898.000	95,34	5,19%
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	100	100	100	6.672.003.442	6.428.478.921	96,35	3,65%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	8	8	100	31.400.000	30.650.000	97,61	2,39%

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing-masing sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan anggaran sebesar 31.358.000,- realisasi anggaran sebesar 29.898.000,- dengan persentase capaian 95,34% sehingga efisiensi anggaran yang tercapai adalah sebesar 5,19% pada tahun 2025;
 2. Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi yang terlaksana dengan anggaran sebesar 6.672.003.442,- realisasi anggaran sebesar 6.428.478.921,- dengan persentase capaian 96,35% sehingga efisiensi anggaran yang tercapai adalah sebesar 3,65% pada tahun 2025;
 3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan indikator kinerja Jumlah Desa yang dibina dengan anggaran 31.400.000,- realisasi anggaran sebesar 30.650.000,- dengan persentase capaian 97,61% sehingga efisiensi anggaran yang tercapai adalah sebesar 2,39% pada tahun 2025.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel 3.7. Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan dibawah ini :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	dokumen non perizinan yang dihasilkan	95,34	menunjang
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	97,88	menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99,99	menunjang
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	97,34	menunjang
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	92,11	menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	96,86	menunjang
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum/dokumen	99,04	menunjang

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerataan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	98,95	menunjang
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	94,95	menunjang
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina	8	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa/jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka lomba desa dan pendayagunaan aset desa	97,61	menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2025 terdapat efisiensi belanja sebesar 6,02% dari pagu anggaran Rp.26.911.520.328,- dengan realisasi anggaran Rp.25.292.448.596,- capaian 93,98% per 31 Desember 2025.

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8. Anggaran, Realisasi dan Capaian per Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.316.812.476	12.804.768.876	96,15
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.466.000	22.838.600	93,35
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.272.597.300	1.126.608.268	88,53
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.840.400	91.040.308	82,14
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.452.000	99.939.350	92,15
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.388.000	22.388.000	100
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.200.000	291.540.870	53,97
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.767.980.710	3.485.592.541	92,50
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.212.000	317.930.958	74,42
11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	585.810.000	540.773.904	92,31
12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90.915.000	88.984.960	97,88
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.480.000	160.476.400	99,99

14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	31.358.000	29.898.000	95,34
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.556.000	6.381.811	97,34
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.265.641.442	1.165.776.700	92,11
17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.159.079.000	4.028.347.976	96,86
18	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	818.412.000	810.578.771	99,04
19	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	141.220.000	139.732.303	98,95
20	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.700.000	28.200.000	94,95
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	31.400.000	30.650.000	97,61
	Total	26.911.520.328	25.292.448.596	93,98

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 menunjukkan gambaran pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian Indikator Utama:** Sebagian besar indikator kinerja utama, khususnya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dan Persentase Layanan sesuai Standar, telah mencapai target yang ditetapkan melalui upaya perbaikan berkelanjutan;
2. **Pembinaan Wilayah:** Pelaksanaan pembinaan terhadap 8 (delapan) Desa di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dalam hal perencanaan dan pelaporan keuangan telah berjalan sesuai koridor, meskipun masih memerlukan pendampingan intensif pada aspek digitalisasi pelaporan;
3. **Efektivitas Program:** Program-program yang menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat, pelestarian seni budaya, serta ketentraman wilayah telah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara. Sesuai dengan realisasi anggaran tahun 2025 Kecamatan Denpasar Utara terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,02% dari pagu anggaran Rp.26.911.520.328,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.292.448.596,- serapan anggaran sebesar 93,98% lebih tinggi dari serapan tahun 2024 sebesar 89,57%.

4.2. Langkah Antisipasi dan Rekomendasi Tahun Mendatang

Menindaklanjuti hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2025, maka untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya, Kecamatan Denpasar Utara mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:**
 - Mengintensifkan **sosialisasi Standar Pelayanan (SP)** secara masif kepada masyarakat melalui media digital dan forum komunikasi tingkat desa.

- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan pada sektor perizinan dan non-perizinan guna memastikan dokumen diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan.
- **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan SDM:**
 - Meningkatkan kualitas **Sumber Daya Aparatur** melalui bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan gratifikasi.
 - Memperkuat fungsi pengawasan internal dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi di tingkat Kecamatan dan Desa.
- **Ketentraman, Ketertiban, dan Pelestarian Budaya:**
 - Mengintensifkan **patroli wilayah secara terpadu** dan memperluas jangkauan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) maupun Perkada kepada masyarakat demi terciptanya ketertiban umum.
 - Memperkuat dukungan dan pembinaan terhadap **pelestarian adat, seni, dan budaya lokal** sebagai fondasi identitas sosial kemasyarakatan di Denpasar Utara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2025 ini disusun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait serta menjadi acuan dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada tahun-tahun mendatang demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN DENPASAR UTARA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA / SKPD / SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Yusswara, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Denpasar Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,

CAMAT DENPASAR UTARA

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

I Wayan Yusswara, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770730 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,16
2.	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100 %
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa


PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp. 19.771.616.668 |
| 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 257.053.000 |
| 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 3.720.527.442 |
| 4. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp. 848.192.000 |
| 5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 177.075.000 |
| 6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 32.200.000 |

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALIKOTA DENPASAR


I Gusti Ngurah Java Negara, SE

Pihak Pertama,
CAMAT DENPASAR UTARA


I Wayan Yusswara, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199802 1 001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR UTARA

JL. MULAWARMAN NO. 1 DENPASAR Telp. NO. 423292 KODE POS 80111

Website: denut.denpasarkota.go.id Email : kecamatanDenut@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUGAS : Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan.

FUNGSI :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,16
2.	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase koordinasi yang terlaksana	100 %
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa

Ditetapkan oleh
Walikota Denpasar



[Signature]

Gunung Agung, 7 Januari 2025
Gubernur Jawa Tengah, SE



7 Januari 2025
Camat Denpasar Utara

Wawan Yusswara, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19770730 199802 1 001